

# Pemanfaatan Diplomasi Publik oleh Indonesia dalam Krisis Covid-19

Jessica Martha

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, jessica.martha@unpar.ac.id

## Abstrak

Munculnya krisis akibat penyebaran Covid-19 telah memaksa tiap-tiap negara untuk menentukan solusi penanganan yang cepat dan tepat. Adanya keterbatasan masing-masing negara akhirnya memunculkan kerja sama di berbagai bidang. *First-track diplomacy* pun semakin meningkat, meskipun dilakukan secara virtual. Berdasarkan fenomena tersebut, apakah diplomasi publik dapat pula dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanggulangan krisis akibat Covid-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan konsep diplomasi publik sebagai manajemen krisis yang disampaikan oleh Claudia Auer dan Eva-Karin Olsson. Dengan menggunakan kedua konsep tersebut, penulis berpendapat bahwa diplomasi publik dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penanggulangan krisis akibat Covid-19 melalui *make sense of event*, *networking*, dan *craft message and event*. Penanganan krisis dengan diplomasi publik pun dapat menghasilkan beberapa manfaat, antara lain mempromosikan nilai-nilai yang dapat meningkatkan stabilitas negara, menciptakan saling pengertian dan memperbaiki kesalahpahaman serta membangun reputasi. Dalam tulisan ini, Taiwan dan Georgia menjadi contoh negara yang berhasil menghadapi krisis dengan memanfaatkan diplomasi publik. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa pemerintah Indonesia pun dapat memanfaatkan diplomasi publik untuk mendukung penanggulangan krisis akibat Covid-19.

**Kata kunci:** Diplomasi Publik; Krisis; Covid-19; Indonesia

## Pendahuluan

Semenjak Perang Dunia kedua berakhir, dunia kembali menghadapi krisis yang sangat serius akibat munculnya pandemi Covid-19. Pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Sebagai virus baru yang belum pernah diketahui sebelumnya, negara-negara di dunia pun belum tahu bagaimana cara menghadapi penyebarannya virus Covid-19 yang begitu cepat. Masing-masing negara mencoba berbagai cara untuk memperlambat penyebaran virus, sebut saja *social distancing*, *lockdown*, pemeriksaan PCR massal, hingga pengembangan vaksin. Beberapa

negara, seperti Korea Selatan, Jerman, dan Taiwan dianggap telah sukses menekan penyebaran Covid-19. Namun, negara lainnya, seperti Italia, Amerika Serikat, dan Spanyol justru harus menghadapi jumlah angka kematian yang semakin meningkat akibat Covid-19.<sup>1</sup>

Terbatasnya pengetahuan tiap negara dalam menekan penyebaran Covid-19, memunculkan kebutuhan tiap negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Semenjak Covid-19 menyebar, terdapat sejumlah pertemuan yang dilakukan, sebut saja KTT Luar Biasa G-20 pada 26 Maret 2020,<sup>2</sup> Pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Alliance for Multilateralism (AoM) pada 16 April 2020, Video Conference Women

---

<sup>1</sup> Addi M. Idhom, "Update Corona 3 April 2020: Data Covid-19 Terbaru Indonesia & Dunia", Tirto.ID, 3 April 2020, <https://tirto.id/eKE7https://tirto.id/update-corona-3-april-2020-data-covid-19-terbaru-indonesia-dunia-eKE7> (diakses 22 April 2020)

<sup>2</sup> Benny D. Koestanto, "Indonesia Perkuat Solidaritas Global Lawan Covid-19", Kompas.id, 17 April 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/internasional/2020/04/17/ri-perkuat-solidaritas-global-lawan-covid-19/> (diakses 22 April 2020)

Foreign Ministers pada 16 April 2020,<sup>3</sup> hingga pertemuan Direktur Pelaksana IMF dengan sejumlah blok keuangan global (Arab Monetary Fund, ASEAN+3, dan G-20) pada 21 April 2020.<sup>4</sup> Pertemuan virtual tersebut dilakukan sebagai Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pertemuan-pertemuan virtual tersebut merupakan bentuk kemitraan konkret antarnegara yang harus terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan global, khususnya dalam kondisi tidak normal akibat pandemi Covid-19. Tidak ada opsi lain bagi masyarakat internasional untuk menghadapi krisis kemanusiaan akibat Covid-19 selain memperkuat kerjasama internasional.<sup>5</sup> Artinya, diplomasi antarnegara menjadi salah satu poin penting dalam upaya penanggulangan krisis akibat Covid-19.

Jika *first-track diplomacy* (hubungan antarpemerintah secara resmi) dinilai perlu ditingkatkan, lalu bagaimana dengan diplomasi publik? Apakah diplomasi publik dapat dimanfaatkan oleh negara, khususnya Indonesia, dalam menghadapi pandemi Covid-19?

### **Diplomasi Publik dan Krisis: Pendekatan Konseptual**

Secara teori, diplomasi publik merupakan proses komunikasi antara pemerintah dan publik asing dalam upaya mewujudkan pemahaman atas ide,

nilai, norma, budaya, hingga tujuan dan kebijakan nasional yang dimiliki negaranya.<sup>6</sup> Artinya, dalam diplomasi publik, komunikasi tidak terbatas pada pemimpin atau perwakilan resmi negara, tetapi ikut melibatkan publik. Dalam kondisi ‘normal’, aktivitas diplomasi publik dilakukan untuk menciptakan opini dan citra positif dari publik asing sehingga mempermudah pencapaian kebijakan luar negeri negara.

Diplomasi publik seringkali dinilai sebagai upaya yang dilakukan negara untuk mendukung *first-track diplomacy* yang dilakukan. Alasannya, upaya pemerintah saja ternyata belum cukup untuk menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks, terutama jika pendekatan dilakukan dengan cara yang formal/kaku. Oleh sebab itu, pemerintah pun perlu mengadakan aktivitas diplomasi publik agar diplomasi dapat berjalan dengan lebih lancar, terutama disebabkan oleh adanya dukungan dari masyarakat internasional.<sup>7</sup>

Selain dalam kondisi ‘normal’, diplomasi publik ternyata dapat dimanfaatkan dalam kondisi krisis. Menurut Boin dan ‘t Hart, krisis merupakan sebuah kondisi dimana sekelompok orang, baik organisasi, kota, ataupun negara, merasakan ancaman mendesak terhadap nilai-nilai (*core value*) dan harus segera ditangani dalam kondisi yang tidak pasti.<sup>8</sup> Pada definisi tersebut, Boin dan

---

<sup>3</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Pidato Menteri Luar Negeri: Remarks Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia”, Kemlu.go.id, 16 April 2020, <https://kemlu.go.id/portal/idAkun/read/1224/pidato/remarks-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-video-conference-women-foreign-ministers-covid-19-and-gender> (diakses 22 April 2020)

<sup>4</sup> Abdul Gafur, “Dunia Bersatu Tangkal Dampak Covid-19 ke Ekonomi Global”, Lampost.co, 22 April 2020, <https://www.lampost.co/berita-dunia-bersatu-tangkal-dampak-covid-19-ke-ekonomi-global.html> (diakses 22 April 2020)

<sup>5</sup> Benny D. Koestanto, “Indonesia Perkuat Solidaritas Global Lawan Covid-19”, Kompas.id, 17 April 2020,

<https://bebas.kompas.id/baca/internasional/2020/04/17/ri-perkuat-solidaritas-global-lawan-covid-19/> (diakses 22 April 2020)

<sup>6</sup> Jan Melissen, *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), h. 11-12.

<sup>7</sup> Benny Susetyo, “Peranan Diplomasi Publik”, Ditpolkom.bappenas.go.id, 18 Desember 2008, [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20\(18%20Desember%202008\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20(18%20Desember%202008).pdf) (diakses 22 April 2020)

<sup>8</sup> Arjen Boin dan Paul ‘T Hart ‘The Crisis Approach’, in *Handbook of Disaster Research* (New York: Springer, 2006), 9–31.

't Hart menekankan pada adanya aksi yang segera dilakukan sebagai bentuk tanggapan aktor-aktor yang terlibat. Dalam *first-track diplomacy*, tanggapan terhadap krisis yang terjadi dapat berupa pertemuan-pertemuan antarnegara, baik bilateral maupun multilateral, yang nantinya akan menghasilkan solusi, baik berupa kesepakatan, perjanjian, ataupun pedoman aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh aktor terkait.

Jika melihat bentuk aktivitasnya, diplomasi publik belum tentu dapat menghasilkan solusi dan aksi yang sama dengan *first-track diplomacy*. Tetapi, diplomasi publik tetap dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam kondisi krisis. Menurut Claudia Auer, diplomasi publik merupakan instrumen manajemen krisis yang dapat digunakan untuk mencegah dan meringankan krisis yang sedang berlangsung. Diplomasi publik dapat dimanfaatkan untuk: a) mempromosikan nilai-nilai yang dapat meningkatkan stabilitas negara; b) menciptakan saling pengertian dan memperbaiki kesalahpahaman; c) membangun reputasi. Diplomasi publik dinilai memiliki manfaat yang sama dengan *first-track diplomacy*, bahkan memiliki kelebihan dalam menjangkau aktor-aktor non-negara, termasuk masyarakat.<sup>9</sup> Selain itu, Eva-Karin Olsson berpendapat bahwa diplomasi publik pun dapat digunakan sebagai instrumen untuk: a) *make sense of event* (memahami krisis yang sedang terjadi dan kemungkinan resiko); b) *networking* (membentuk jaringan komunikasi antara aktor negara dan/atau non-negara); c) *craft message and communicate* (menentukan bentuk dan cara penyampaian pesan dengan mempertimbangkan perbedaan antaraktor).<sup>10</sup> Artinya, diplomasi publik dapat

ikut mempengaruhi proses komunikasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam krisis, baik sebelum ataupun ketika krisis berlangsung.

### **Indonesia, Covid-19, dan Pemanfaatan Diplomasi Publik**

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan temuan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Dua WNI yang berdomisili di Depok diketahui melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang menjadi kasus positif ke-24 di Malaysia. Lalu, penambahan kasus positif Covid-19 pun terus mengalami peningkatan hingga ribuan. Pemerintah pun segera bertindak untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, mulai dari kontak tracing (pelacakan) pada orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien positif, menyiapkan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, hingga menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular di Pulau Galang pun dilakukan. Selain itu, pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga dibentuk untuk menentukan langkah-langkah strategis.<sup>11</sup>

Sebelum ditemukan kasus positif, sejumlah negara sempat mencurigai Indonesia yang menyatakan bahwa negaranya bebas dari penyebaran Covid-19. Indonesia dinilai belum mampu melakukan pengujian yang akurat, tidak memiliki sistem kesehatan yang memadai, hingga pemerintah dianggap menyembunyikan fakta

---

<sup>9</sup> Claudia Auer, "Conceptualizing Political Crisis and the Role of Public Diplomacy in Crisis Communication Research," *The Handbook of International Crisis Communication Research*, (2016): 119–132, diakses pada 22 April 2020, <https://doi.org/10.1002/9781118516812.ch12>

<sup>10</sup> Eva-Karin Olsson, "Public Diplomacy as a Crisis Communication Tool",

*Journal of International Communication*, Vol. 19 (2013): 219-234, diakses 22 April 2020, <https://doi.org/10.1080/13216597.2013.838906>

<sup>11</sup> Iwan Setiyawan, "Upaya Pemerintah Menangani Pandemi Covid-19", Kompas.id, 1 April 2020, <https://kompas.id/baca/foto/2020/04/01/upaya-pemerintah-menangani-pandemi-covid-19/> (diakses 22 April 2020)

sebenarnya dari masyarakat.<sup>12</sup> Kecurigaan tersebut tentu saja menciptakan citra dan opini negatif mengenai Indonesia. Di sisi lain, masyarakat pun mulai khawatir, panik, hingga ragu terhadap kemampuan pemerintah. Respon negatif pun tidak berhenti seiring ditemukannya ribuan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, pemerintah dinilai kurang cepat dan efektif dalam menangani penyebaran, khususnya presiden dan menteri kesehatan. Pemerintah pun dinilai menganggap remeh masalah. Sementara itu, pihak lainnya berpendapat bahwa pemerintah Indonesia gagal menyediakan transparansi data dan akses informasi terkait Covid-19.<sup>13</sup> Menyadari munculnya opini negatif yang berdampak pada terciptanya citra negatif, maka penting untuk memanfaatkan diplomasi publik sembari menjalankan *first-track diplomacy*.

Pertama, *make sense of event*. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan diplomasi publik untuk menciptakan pemahaman tentang krisis, termasuk ancaman, resiko, dan kemungkinan apa saja yang bisa terjadi. Pemerintah Indonesia dapat mengumpulkan informasi dari pengalaman negara dan organisasi lainnya yang sudah terlebih dahulu menghadapi pandemi Covid-19. Dari informasi-informasi tersebut, pemerintah dapat menentukan solusi untuk menghadapi krisis Covid-19 di Indonesia. Sebagai contoh, ketika berita mengenai munculnya penyakit misterius di Wuhan, Taiwan diprediksi akan menjadi salah satu negara yang tertular dengan cepat. Menyadari kondisi tersebut, Taiwan

menunjukkan keterbukaan dengan mendengarkan saran dari berbagai pihak, mulai dari organisasi kesehatan, ilmuwan, dan dokter. Kemudian, Taiwan pun belajar dari pengalamannya ketika menghadapi SARS pada tahun 2003 dimana Taiwan menjadi negara yang mengalami dampak terparah. Dari informasi-informasi yang dikumpulkan, pemerintah pun segera melakukan sejumlah tindakan untuk mengantisipasi resiko akibat Covid-19, antara lain memeriksa kesehatan warganya (khususnya yang melakukan perjalanan dari Tiongkok), mengaktifkan pusat-pusat komando, dan memastikan persediaan masker.<sup>14</sup> Dengan pengumpulan informasi yang cepat dan tepat, Taiwan dapat mencegah krisis akibat Covid-19 seperti yang dialami Tiongkok dan negara-negara lainnya.

Taiwan pun menjadi *role model* bagi negara lainnya, sebut saja Israel dan Selandia Baru. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengungkapkan bahwa negaranya akan “*going to follow, pretty closely, the Taiwanese model*.”<sup>15</sup> Tindakan serupa dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya dalam menekan angka penderita Covid-19. Pemerintah dapat mengumpulkan informasi dari negara-negara yang berhasil menekan angka penyebaran Covid-19, menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kemudian menyiapkan solusi strategis yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Selain itu, pemerintah pun dapat menentukan pihak-pihak yang tepat untuk dilibatkan dalam menangani krisis. Dengan kata

---

<sup>12</sup> Achmad Nasrudin, “Pemerintah Diminta Merespons Dunia Internasional yang Ragukan Indonesia Bebas Corona”, Kompas.com, 1 Maret 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/01/20212091/pemerintah-diminta-merespons-dunia-internasional-yang-ragukan-indonesia?page=2> (diakses 22 April 2020)

<sup>13</sup> HRW, “Indonesia: Little Transparency in COVID-19 Outbreak”, hrw.org, 9 April 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/04/09/indonesia->

[little-transparency-covid-19-outbreak](https://www.hrw.org/news/2020/04/09/indonesia-little-transparency-covid-19-outbreak) (diakses 22 April 2020)

<sup>14</sup> William Yang, “How has Taiwan Kept Its Coronavirus Infection Rate So Low?”, dw.com, 9 April 2020, <https://www.dw.com/en/taiwan-coronavirus/a-52724523> (diakses 22 April 2020)

<sup>15</sup> Nick Aspinwall, “Taiwan is Exporting Its Coronavirus Successes to the World”, foreignpolicy.com, 9 April 2020, <https://foreignpolicy.com/2020/04/09/taiwan-is-exporting-its-coronavirus-successes-to-the-world/> (diakses 23 April 2020)

lain, diplomasi publik dapat dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk menentukan keputusan yang harus diambil dalam menangani krisis Covid-19.

Berikutnya, *networking*. Setelah menentukan respon internal terkait krisis yang terjadi, pemerintah dapat membangun jaringan komunikasi dan kemitraan dengan aktor negara ataupun non-negara. Jaringan komunikasi dan kemitraan tersebut nantinya dapat digunakan untuk membantu pemerintah menghadapi krisis. Selain itu, jaringan komunikasi diperlukan karena krisis biasanya merusak komunikasi maupun kemitraan yang pernah ada sebelumnya. Salah satu penyebab rusaknya kemitraan tersebut adalah kecurigaan antaraktor mengenai aktor utama penyebab terjadinya krisis atau upaya penanggulangan masing-masing negara yang dinilai tidak efektif. Di sisi lain, komunikasi yang buruk juga dapat menghambat upaya penanggulangan krisis. Maka dari itu, masing-masing aktor perlu mempertahankan kredibilitasnya sehingga dapat menjadi mitra bagi pihak yang sedang mengalami krisis. Dengan begitu, kerja sama untuk penanggulangan krisis pun dapat berjalan dengan baik.

Ketika virus Covid-19 menyebar ke seluruh penjuru dunia, spekulasi mengenai penyebar virus ini pun mulai bermunculan. Adanya aksi saling tuduh antara Tiongkok dan Amerika Serikat memunculkan ancaman dari Donald Trump untuk membekukan pendanaan WHO. Menurut Donald Trump, WHO bersikap ‘Chinasentris’. Kemudian, perselisihan terjadi pula antara negara-negara Eropa ketika Italia meminta bantuan perlengkapan kesehatan. Secara bilateral, Amerika Serikat juga

menciptakan perselingan dengan beberapa negara, misalnya melarang India mengekspor obat anti-malaria *hydroxychloroquine*. Brasil dan Tiongkok, yang selama ini menjadi rekan dagang, sempat berselisih di media sosial akibat pernyataan Menteri Pendidikan Brasil yang dianggap rasis.<sup>16</sup>

Seorang peneliti di Overseas Development Institute, mengatakan bahwa krisis akibat Covid-19 menawarkan kerja sama yang lebih luas. Georgia, negara kecil dengan perekonomian yang lemah, sejauh ini dinilai sukses mengatasi penyebaran Covid-19 dengan memanfaatkan *networking*. Setelah menentukan respon-respon internal dalam menghadapi pandemi, Georgia membangun kemitraan sejumlah negara dan organisasi internasional. Kemitraan tersebut dibangun karena Georgia memahami keterbatasan negaranya dalam menghadapi Covid-19. Melalui *Country Development Cooperation Strategies* (CDCS), Georgia mendapatkan bantuan dari USAID untuk meningkatkan kapasitas *Georgia’s National Center for Disease Control* sehingga Georgia dapat mendiagnosa COVID-19 dengan cepat dan tepat. Bahkan Georgia pun dapat berkontribusi dalam penelitian-penelitian berskala global mengenai virus Covid-19. Bantuan keuangan pun diperoleh Georgia yang ditujukan untuk tindakan pencegahan, pengendalian, dan pengawasan terkait kasus-kasus Covid-19.<sup>17</sup>

Selain itu, bantuan keuangan jangka pendek dan menengah diperoleh juga dari NATO. Bantuan keuangan tersebut digunakan untuk meningkatkan produksi peralatan medis yang diperlukan Georgia. Penyediaan peralatan juga diajukan kepada *Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre* (EADRCC),

---

<sup>16</sup> Fernando Duarte, “Diplomasi Virus Corona: Bagaimana Covid-19 Memicu Ketegangan Internasional karena Pil, Masker, dan Berbagai Tuduhan”, *bbc.com*, 11 April 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52240043> (diakses 23 April 2020)

<sup>17</sup> Irakli Sirbiladze, “How the Partnership with the West Shaped Georgia’s COVID-19 Response”, *neweasterneurope.eu*, 22 April 2020, <https://neweasterneurope.eu/2020/04/22/how-the-partnership-with-the-west-shaped-georgias-covid-19-response/> (diakses 23 April 2020)

contohnya penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Bagi Georgia, bantuan dari Amerika Serikat dan NATO dapat meningkatkan kesiapan Georgia dalam menghadapi Covid-19.<sup>18</sup> Terbukti, Georgia pun disebut sebagai salah satu negara yang sukses menghadapi pandemi Covid-19.

Indonesia pun dapat belajar dari pemanfaatan diplomasi publik yang dilakukan oleh Georgia. Indonesia dapat mulai membuka kesempatan kerja sama dengan negara ataupun aktor non-negara lainnya. Ketika negara lain berdebat, Georgia membuka peluang untuk bekerjasama dengan negara lainnya. Georgia juga menunjukkan keterbukaan dalam mengungkapkan kondisi negaranya yang tidak sepenuhnya siap dalam menghadapi Covid-19. Dalam beberapa kesempatan, Presiden dan Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengajak negara-negara lainnya untuk membangun kemitraan dan bekerjasama menekan penyebaran Covid-19. Kemitraan dalam saling tukar informasi, pengembangan penelitian, *clinical treatment, test practice*, hingga perlindungan warga negara ditawarkan Indonesia pada negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia pun menekankan bahwa kemitraan yang dibangun perlu didukung dengan komunikasi yang baik untuk memerangi stigma, diskriminasi, dan kecurigaan antarnegara.<sup>19</sup> Artinya, diplomasi publik dapat digunakan untuk memastikan bahwa *networking* dapat dibangun guna menghindari persepsi negatif mengenai tindakan penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Selain itu, terbentuknya citra buruk mengenai negara Indonesia pun dapat dihindari.

Kemitraan tidak akan terbentuk tanpa adanya penyampaian informasi yang tepat. Maka dari itu,

pemerintah perlu mempertimbangkan *how to craft message and communicate*. Pemerintah perlu menentukan strategi komunikasi yang tepat ketika berhadapan dengan pemangku kepentingan yang berbeda. Aspek budaya, agama, adat-istiadat tertentu pun perlu dipertimbangkan agar kemitraan dan komunikasi bisa mendukung pencapaian tujuan bersama. Beberapa bentuk penyampaian informasi yang tidak tepat justru dapat merusak hubungan kerja sama yang sebenarnya diperlukan oleh negara. Brasil harus berselisih dengan mitra dagang utamanya, Tiongkok, setelah adanya tuduhan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Brasil, Abraham Wentrub. Menurutnya, penyebaran virus Covid-19 memiliki hubungan dengan rencana Tiongkok untuk mendominasi dunia. Bahkan, Weintraub menulis *tweet* dengan mengganti huruf “r” menjadi huruf “L”-*BLazil*- sebagai bentuk sindiran terhadap akses Tiongkok. Tidak hanya itu, seorang anggota parlemen Brasil, Eduardo Bolsonaro, menyebut Covid-19 sebagai “*Chinese Virus*”. Tindakan yang sama pun dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.<sup>20</sup> Selain mengganggu kemitraan, penyampaian pesan yang tidak tepat pun mempengaruhi opini publik dan citra yang terbentuk di tengah masyarakat. Tidak sedikit publik asing yang akhirnya mencurigai Tiongkok sebagai penyebar virus Covid-19. Tiongkok juga dianggap memanfaatkan pandemi ini untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya melalui masker dan peralatan kesehatan lainnya yang didistribusikan ke negara lainnya.

Maka dari itu, pemerintah perlu mempertimbangan strategi komunikasi yang tepat. Indonesia juga sempat menerima penilaian

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Rakhmat Nur Hakim, “Indonesia dan Negara ASEAN Sepakat Perkuat Kerja Sama Tangani Covid-19”, Kompas.com, 14 April 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/16370241/indonesia-dan-negara-asean-sepakat-perkuat-kerja-sama-tangani-covid-19> (diakses 23 April 2020)

<sup>20</sup> AFP, “China Outraged After Brazil Minister Suggests Covid-19 is Part of Plan for World Domination”, theguardian.com, 7 April 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/china-outraged-after-brazil-minister-suggests-covid-19-is-part-of-plan-for-world-domination> (diakses 23 April 2020)

buruk ketika pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia ‘kebal’ Covid-19. Penilaian tersebut berdampak negatif, salah satunya Arab Saudi yang melarang masuknya jamaah haji Indonesia. Sejumlah pihak menyebutkan bahwa cara Menteri Kesehatan Indonesia, Terawan Agus Putranto, tidak cukup untuk menciptakan opini positif. Sebaliknya, pesan dan gaya komunikasi yang digunakannya membuat masyarakat dalam negeri panik dan kebingungan. Sementara, bagi publik asing, Indonesia dinilai tidak kompeten dalam mengantisipasi ancaman Covid-19.<sup>21</sup>

Pemerintah Indonesia dapat mulai mempertimbangkan beberapa hal sebelum berkomunikasi dengan publik. Menurut WHO, terdapat enam prinsip dalam membangun strategi komunikasi yang baik, antara lain *accessible* (identifikasi kemampuan audiens dalam mengakses informasi), *actionable* (pemahaman terhadap pengetahuan, sikap, dan target audiens), *credible and trusted* (perkuat kepercayaan sehingga informasi dapat diterima dengan baik), *relevant* (informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan audiens), *timely* (informasi bersifat aktual), dan *understandable* (informasi mudah dipahami).<sup>22</sup> Dengan mempertimbangkan enam prinsip tersebut, diharapkan pemerintah dapat menyampaikan informasi dengan cara yang tepat sehingga masyarakat pun dapat lebih mudah dalam memahami dan menerima setiap informasi yang disampaikan. Lebih dari itu, berbagai kesalahpahaman, kecurigaan, ataupun ketidakpercayaan dapat diminimalisir dengan adanya strategi komunikasi yang tepat.

Dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik ternyata dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi krisis akibat Covid-19. Melalui *make sense of event*,

pemerintah dapat menyampaikan tanggapannya mengenai Covid-19, mulai dari krisis apa yang sedang terjadi, resiko hingga solusi yang ditawarkan Indonesia. Tanggapan tersebut bisa disampaikan kepada pemerintah dan publik negara lainnya sehingga tidak ada kesalahpahaman yang terbentuk. Kemudian, diplomasi publik juga dapat digunakan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari negara, aktor non-negara, termasuk publik asing. Kerja sama tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Terakhir, *how to craft message and communicate* pun perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Strategi komunikasi yang tepat dapat membantu pemerintah dalam membentuk citra dan opini positif mengenai Indonesia. Citra dan opini positif tersebut sebenarnya akan berdampak pula pada bantuan, dukungan, dan kerja sama yang dapat terbentuk untuk mendukung upaya penanggulangan krisis Covid-19 di Indonesia.

### **Capaian Diplomasi Publik dalam Krisis Covid-19**

Beberapa negara dinilai telah berhasil dalam menekan penyebaran virus Covid-19 di dalam negaranya masing-masing. Bahkan, negara-negara tersebut mulai menawarkan bantuan ke negara lainnya. Taiwan dan Georgia merupakan dua contoh negara yang berhasil memanfaatkan diplomasi publik untuk *make sense of event*, membangun *networking*, dan menentukan *how to craft message and communicate*. Lalu, selain berkurangnya angka penyebaran virus Covid-19, adakah manfaat lainnya yang diperoleh oleh kedua negara tersebut?

---

<sup>21</sup> Jakarta Post, “How Come Indonesia has no Covid-19 Cases?: Jakarta Post”, [straitstimes.com](https://www.straitstimes.com/asia/how-come-indonesia-has-no-covid-19-cases-jakarta-post), 2 Maret 2020, <https://www.straitstimes.com/asia/how-come-indonesia-has-no-covid-19-cases-jakarta-post> (diakses 23 April 2020)

<sup>22</sup> WHO, *WHO Strategic Communications Framework for Effective Communications* (Switzerland: WHO Department of Communication), 4-39, diakses 23 April 2020, <https://www.who.int/mediacentre/communication-framework.pdf>

Pada dasarnya, diplomasi publik dapat digunakan untuk meningkatkan citra negara, baik di dalam ataupun luar negeri. Reputasi yang baik pun dapat dibentuk. Dalam kasus Taiwan dan Georgia, keduanya berhasil diakui sebagai negara sukses. Meskipun masing-masing memiliki keterbatasan, namun keduanya dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Israel dan Selandia Baru pun secara terang-terangan mengakui akan mengikuti langkah strategis yang telah dilakukan oleh Taiwan dan Georgia. Keduanya pun mendapat kepercayaan dari publik asing. Taiwan yang sebelumnya pernah mengalami keterpurukan akibat SARS, diramalkan akan mengalami kondisi yang serupa akibat Covid-19. Namun, Taiwan berhasil mengubah penilaian tersebut. Pujian untuk Taiwan pun mengalir dari WHO dan negara lainnya. Georgia pun mendapatkan pujian. Beberapa media internasional mengungkapkan “*despite its small size and a struggling economy, the country has achieved more success in this furious fight than relatively rich and developed European countries.*”<sup>23</sup>

Diplomasi publik di tengah krisis pun dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan nilai-nilai tertentu. Sebagai negara demokratis, Taiwan sempat dianggap tidak akan mampu dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19. Sebaliknya, negara dengan sistem otoritarian akan lebih berhasil. Namun, Taiwan membuktikan, dengan adanya keterbukaan informasi, keterlibatan aktor non-negara dan masyarakat, dan transparansi ternyata lebih efektif dalam penanggulangan krisis.<sup>24</sup> Pihak-

pihak yang awalnya sempat meragukan nilai ‘keterbukaan’ dan ‘transparansi’ dalam sistem demokrasi pun akhirnya mengakui bahwa kedua nilai tersebut penting untuk menekan angka penyebaran virus.

Terakhir, diplomasi publik dapat mendukung terciptanya kerja sama antarnegara. Setelah dinilai berhasil dalam menghadapi penyebaran Covid-19, Georgia menjadi mitra penting bagi Amerika Serikat, khususnya dalam peperangan melawan Covid-19. Di sisi lain, Taiwan pun membuka kesempatan kerja sama untuk memerangi pandemi Covid-19. Hal ini pun dilakukan untuk memperbaiki kesalahpahaman yang telah terjadi sebelumnya antara Taiwan dan WHO. Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengungkapkan, “Meski Taiwan telah secara tidak adil dicampakan oleh WHO dan PBB, kami tetap ingin memakai kekuatan kita di bidang manufaktur, pengobatan, dan teknologi untuk bekerja dengan dunia.”<sup>25</sup>

## Referensi

### Buku:

Boin, Arjen dan Paul ‘T Hart ‘The Crisis Approach’, in *Handbook of Disaster Research*. New York: Springer, 2006.

Melissen, Jan. *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* New York: Palgrave Macmillan, 2005.

WHO, *WHO Strategic Communications Framework for Effective Communications*. Switzerland: WHO Department of

---

<sup>23</sup> Ana Dumbadze, “Top 10 Articles in International Media about Georgia”, *georgiatoday.ge*, 10 April 2020, <http://georgiatoday.ge/news/20531/Top-10-Articles-in-International-Media-about-Georgia> (diakses 23 April 2020)

<sup>24</sup> Victor Lin Pu, “The Coronavirus Outbreak: How Democratic Taiwan Outperformed Authoritarian China”, *thediplomat.com*, 27 Februari 2020, <https://thediplomat.com/2020/02/the-coronavirus->

[outbreak-how-democratic-taiwan-outperformed-authoritarian-china/](https://thediplomat.com/2020/02/the-coronavirus-outbreak-how-democratic-taiwan-outperformed-authoritarian-china/) (diakses 23 April 2020)

<sup>25</sup> Tommy Kurnia, “Sempat Diabaikan WHO, Taiwan Dipuji Dunia karena Unggul Lawan Corona COVID-19”, *liputan6.com*, 18 April 2020, <https://www.liputan6.com/global/read/4230436/sempat-diabaikan-who-taiwan-dipuji-dunia-karena-unggul-lawan-corona-covid-19> (diakses 23 April 2020)



Communication,  
<https://www.who.int/mediacentre/communication-framework.pdf>.

#### **Artikel Jurnal:**

Auer, Claudia. "Conceptualizing Political Crisis and the Role of Public Diplomacy in Crisis Communication Research," *The Handbook of International Crisis Communication Research*, (2016): 119–132,  
<https://doi.org/10.1002/9781118516812.ch12>.

Olsson, Eva-Karin. "Public Diplomacy as a Crisis Communication Tool", *Journal of International Communication*, Vol. 19 (2013): 219-234,  
<https://doi.org/10.1080/13216597.2013.838906>.

#### **Website:**

AFP, "China Outraged After Brazil Minister Suggests Covid-19 is Part of Plan for World Domination", 7 April 2020,  
<https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/china-outraged-after-brazil-minister-suggests-covid-19-is-part-of-plan-for-world-domination>.

Aspinwall, Nick. "Taiwan is Exporting Its Coronavirus Successes to the World", 9 April 2020,  
<https://foreignpolicy.com/2020/04/09/taiwan-is-exporting-its-coronavirus-successes-to-the-world/>.

Duarte, Fernando. "Diplomasi Virus Corona: Bagaimana Covid-19 Memicu Ketegangan Internasional karena Pil, Masker, dan Berbagai Tuduhan", 11 April 2020,  
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52240043>.

Dumbadze, Ana. "Top 10 Articles in International Media about Georgia", 10 April 2020, <http://georgiatoday.ge/news/20531/Top-10-Articles-in-International-Media-about-Georgia>.

Gafur, Abdul. "Dunia Bersatu Tangkal Dampak Covid-19 ke Ekonomi Global", 22 April 2020,  
<https://www.lampost.co/berita-dunia-bersatu-tangkal-dampak-covid-19-ke-ekonomi-global.html>.

Hakim, Rakhmat Nur. "Indonesia dan Negara ASEAN Sepakat Perkuat Kerja Sama Tangani Covid-19", 14 April 2020,  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/16370241/indonesia-dan-negara-asean-sepakat-perkuat-kerja-sama-tangani-covid-19>.

HRW, "Indonesia: Little Transparency in COVID-19 Outbreak", 9 April 2020,  
<https://www.hrw.org/news/2020/04/09/indonesia-little-transparency-covid-19-outbreak>.

Idhom, Addi M. "Update Corona 3 April 2020: Data Covid-19 Terbaru Indonesia & Dunia", 3 April 2020,  
<https://tirto.id/eKE7https://tirto.id/update-corona-3-april-2020-data-covid-19-terbaru-indonesia-dunia-eKE7>.

Jakarta Post, "How Come Indonesia has no Covid-19 Cases?: Jakarta Post", 2 Maret 2020,  
<https://www.straitstimes.com/asia/how-come-indonesia-has-no-covid-19-cases-jakarta-post>.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Pidato Menteri Luar Negeri: Remarks Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia", 16 April 2020,  
<https://kemlu.go.id/portal/idAkun/read/1224/pidato/remarks-minister-for-foreign-affairs-of-the-republic-of-indonesia-video-conference-women-foreign-ministers-covid-19-and-gender>.

Koestanto, Benny D. "Indonesia Perkuat Solidaritas Global Lawan Covid-19", 17 April 2020,  
<https://bebas.kompas.id/baca/internasional/2020/04/17/ri-perkuat-solidaritas-global-lawan-covid-19/>.

Kurnia, Tommy. “Sempat Diabaikan WHO, Taiwan Dipuji Dunia karena Unggul Lawan Corona COVID-19”, 18 April 2020, <https://www.liputan6.com/global/read/4230436/sempat-diabaikan-who-taiwan-dipuji-dunia-karena-unggul-lawan-corona-covid-19>.

Nasrudin, Achmad. “Pemerintah Diminta Merespons Dunia Internasional yang Ragukan Indonesia Bebas Corona”, 1 Maret 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/01/20212091/pemerintah-diminta-merespons-dunia-internasional-yang-ragukan-indonesia?page=2>.

Pu, Victor Lin. “The Coronavirus Outbreak: How Democratic Taiwan Outperformed Authoritarian China”, 27 Februari 2020, <https://thediplomat.com/2020/02/the-coronavirus-outbreak-how-democratic-taiwan-outperformed-authoritarian-china/>.

Setiyawan, Iwan. “Upaya Pemerintah Menangani Pandemi Covid-19”, 1 April 2020, <https://kompas.id/baca/foto/2020/04/01/upaya-pemerintah-menangani-pandemi-covid-19/>.

Sirbiladze, Irakli. “How the Partnership with the West Shaped Georgia’s COVID-19 Response”, 22 April 2020, <https://neweasterneurope.eu/2020/04/22/how-the-partnership-with-the-west-shaped-georgias-covid-19-response/>

Susetyo, Benny. “Peranan Diplomasi Publik”, 18 Desember 2008, [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20\(18%20Desember%202008\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20(18%20Desember%202008).pdf).

Yang, William. “How has Taiwan Kept Its Coronavirus Infection Rate So Low?”, 9 April 2020, <https://www.dw.com/en/taiwan-coronavirus/a-52724523>.